

Kertas Kebijakan
(RIA Statement)

Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Ende-NTT



FORDFOUNDATION



Kertas Kebijakan
(RIA Statement)

Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Ende-NTT

TIM PENELITI KPPOD

Principal Investigator Robert Endi Jaweng

Koordinator Peneliti Boedi Rheza

Peneliti Nur Azizah Febryanti

H. Nurcahyadi Suparman



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah



Daftar Isi

Tim Peneliti	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar dan Tabel	v
I. Latar Belakang	1
II. Perumusan Masalah	2
III. Identifikasi Tujuan	4
IV. Alternatif Tindakan	4
IV.1. Opsi 1: Do Nothing	4
IV.2. Opsi 2: Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	4
IV.3. Opsi 3: Perbaikan Kebijakan Pengembangan Kakao	6
V. Analisis Biaya dan Manfaat	7
V.1. Opsi 1: Do Nothing	7
V.2. Opsi 2: Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	8
V.3. Opsi 3: Peningkatan Kebijakan Pengembangan Kakao	12
VI. Alternatif Terpilih	17
VII. Strategi Implementasi	17
VIII. Konsultasi Stakeholders	24



Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1.	Keterbatasan anggaran dan program pemda serta lemahnya koordinasi di antara stakeholders	3
Tabel 1.	Analisis Resiko Opsi I	7
Tabel 2.	Indikator dan Baseline Opsi I	7
Tabel 3.	Analisis Manfaat Opsi II	9
Tabel 4.	Analisis Biaya Opsi II	12
Tabel 5.	Analisis Manfaat Opsi III	13
Tabel 6.	Analisis Biaya Opsi III	16
Tabel 7.	Perbandingan Manfaat Biaya	18
Tabel 8.	Sosialisasi Tahapan Teknis Mengenai Syarat Kadar Air 7% kepada Petani	19
Tabel 9.	Memberi Pemahaman kepada Petani agar Tidak Melakukan Sistem Ijon	20
Tabel 10.	Peningkatan SDM Petani	21
Tabel 11.	Memperkuat Lembaga Keuangan Desa seperti UBSP, Koperasi dan BUMDes	22
Tabel 12.	Intensifikasi dan Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan	23
Tabel 13.	Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Kakao	24
Tabel 14.	Konsultasi Publik	25



I. Latar Belakang

Membangun daerah berbasis produk unggulan patut menjadi pilihan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era desentralisasi ini. Strategi ini juga sudah menjadi kebijakan nasional yang tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Permendagri ini memberikan kerangka dasar dan arahan kepada Pemda untuk merancang kebijakan dan kelembagaan yang relevan guna mendukung optimalisasi sektor unggulan di daerahnya masing-masing.

Salah satu komoditas unggulan yang banyak dikembangkan di sebagian wilayah di Indonesia adalah kakao (*Theobroma Cacao*). Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur [NTT]—sebagai lokasi program yang hendak diulas dalam naskah ini—ditetapkan sebagai salah satu kawasan perkebunan kakao oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Perkebunan (Kepmentan) No. 46/Kpts/PD.300/2015. Sejalan dengan keputusan ini, dalam RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, kakao dipilih menjadi komoditas utama untuk dikembangkan sebagai andalan dalam pembangunan.

Pilihan kakao sebagai produk unggulan tersebut jelas sangat tepat atas dasar sejumlah faktor pertimbangan berikut. Pertama, kakao memiliki tingkat produksi paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Kakao mengalami peningkatan produksi dari 3,920.64 ton pada tahun 2013 menjadi 4,469.84 ton pada tahun

2014. Peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan jambu mente dan kemiri, serta kelapa dan kopi yang mengalami penurunan jumlah produksi; Kedua, pada tahun 2013 terjadi peningkatan luasan lahan pada komoditas kakao, yakni dari sebelumnya 7772 Ha menjadi 7943 Ha. Ini merupakan angka peningkatan paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya, yaitu sebesar 2%; Ketiga, dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang berusaha/bekerja di komoditas kakao, yakni dari 10.056 KK menjadi 10.300 KK (Dishutbun Kabupaten, 2014).

Selain itu, berdasarkan *Share Analysis* (2015) yang dibuat Tim KPPOD, kakao merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Ende dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. Untuk pangsa dalam PDRB, komoditas Kakao menyumbang sebanyak 0.29%, disusul mente sebanyak 0.18%, kelapa 0.06%, dan kemiri sebesar 0.04%. Peran komoditas kakao terhadap PDRB di sektor pertanian juga menyumbang prosentase tertinggi dibandingkan komoditas lain, yakni sebesar 0.88%, disusul dengan mente 0.53%, kelapa 0.18%, dan kemiri 0.13%. Sedangkan dalam PDRB perkebunan, komoditas kakao menyumbang sebanyak 3.44%, disusul mente 2.08%, kelapa 0.7% dan kemiri 0.5%.

Namun, upaya pengembangan kakao di Kabupaten Ende menghadapi sejumlah kendala atau persoalan. Pemda Ende belum memiliki kebijakan khusus dan program konkret yang berfokus kepada pengembangan usaha pertanian kakao. Tidak berlebihan mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan usaha kakao dibiarkan

tumbuh sendiri tanpa dukungan yang signifikan dari Pemda.

Kondisi tata niaga kakao di Ende sendiri didominasi oleh pedagang. Penelitian KPPOD (2015), menunjukkan bahwa belum banyak petani yang memainkan peran dalam rantai perdagangan kakao di Ende. Tingkat harga yang digunakan dalam perdagangan kakao di Ende mengacu pada tingkat harga yang ditetapkan oleh kedua pasar besar komoditas kakao, yaitu bursa komoditi di *New York* dan *London*. Sementara pada tingkat petani, harga cenderung bergantung kepada sisi permintaan pasar. Karena itu, posisi petani dalam rantai perdagangan kakao juga tidak terlalu kuat. Petani lebih sebagai penerima harga (*price taker*), di tengah lemahnya organisasi petani kakao yang belum kunjung memiliki kapasitas yang kuat untuk meningkatkan daya tawar petani dalam rantai pemasaran kakao.

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, KPPOD, Pemda Ende dan *Ford Foundation* bekerja sama merancang sebuah kertas kebijakan untuk pengembangan kakao melalui pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA adalah teknik menganalisis sebuah regulasi yang sudah ada atau baru dengan menyajikan berbagai opsi informasi berbasis data empiris kepada para pengambil keputusan tentang dampak, baik dari sisi biaya maupun manfaat dari sebuah regulasi (*instrument for quality improvement*). Dalam metode RIA ditempuh serangkaian tahapan proses yang dijalankan bersama-sama antara tim perumus peraturan dengan *stakeholders* terkait. Tahapan tersebut meliputi: perumusan masalah, identifikasi tujuan, perumusan alternatif tindakan (untuk mencapai tujuan), analisis manfaat-biaya (untuk memilih alternatif yang dianggap terbaik dalam mencapai tujuan), dan strategi implementasi (untuk merealisasikan alternatif tindakan yang dipilih). Pada setiap tahapan tersebut dilakukan

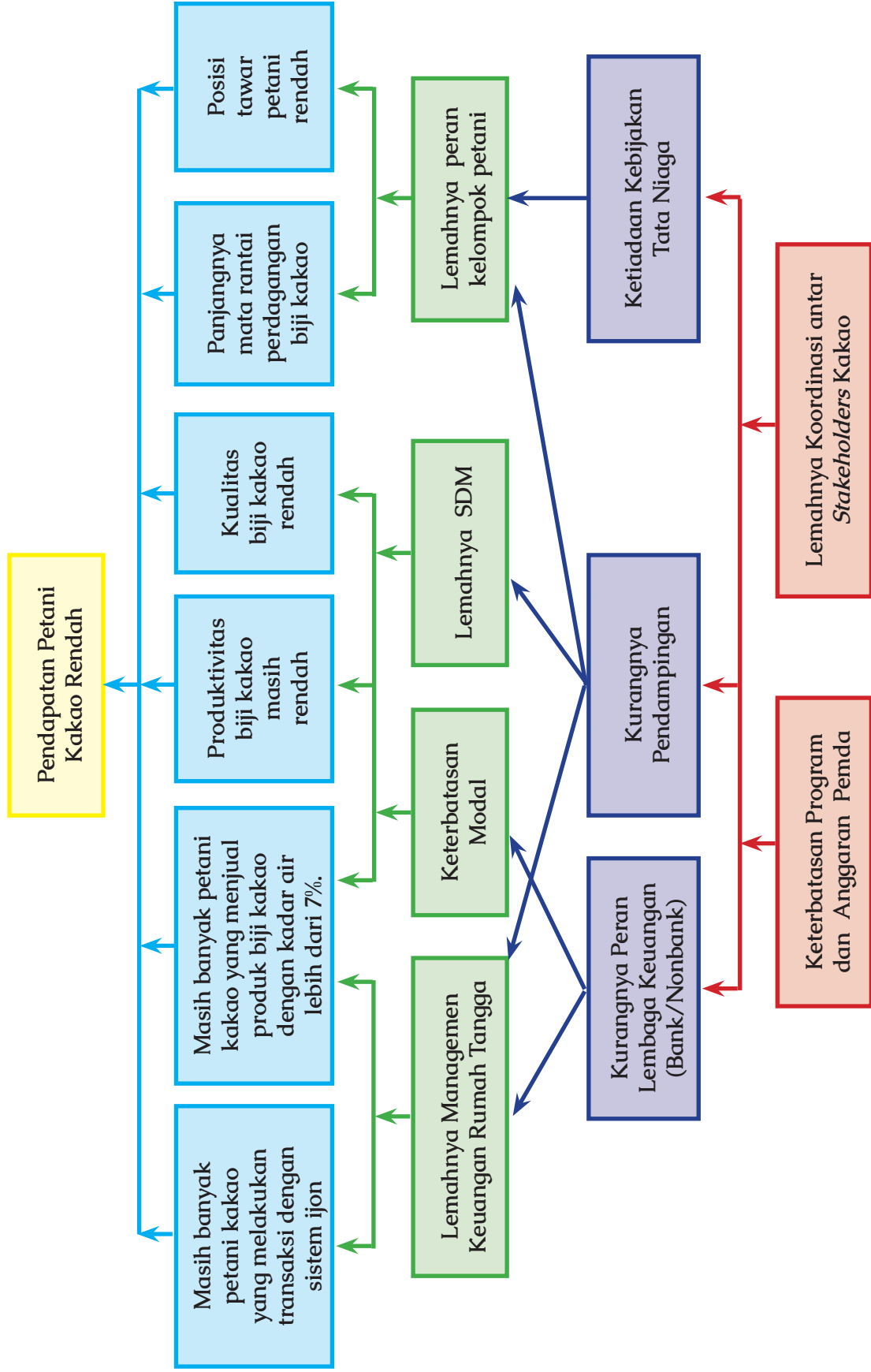
konsultasi *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dan hasilnya dirumuskan dalam sebuah laporan ringkas yang bernama “*RIA Statement [RIAS]*”.

II. Perumusan Masalah

Masalah utama dalam rantai nilai pengembangan usaha kakao di Kabupaten Ende adalah pendapatan petani kakao rendah. Berdasarkan konsultasi *stakeholders* kakao, masalah ini berakar pada sejumlah faktor, yaitu (1) Masih banyak petani kakao yang menjual biji kakao dengan kadar air lebih dari 7%; (2) Masih banyak petani kakao yang melakukan transaksi dengan sistem ijon; (3) Produktivitas biji kakao rendah yang pada gilirannya mempengaruhi kuantitas kakao yang dijual; (4) Panjangnya rantai perdagangan biji kakao; (5) Kualitas biji kakao rendah; (6) Posisi tawar petani yang tidak kuat.

Masalah petani menjual biji kakao dengan kadar air lebih dari 7% berakar pada lemahnya kemampuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga. Selain itu, masalah ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan modal dan lemahnya kualitas SDM. Kondisi SDM dan modal ini yang menyebabkan tingkat produktivitas dan kualitas biji kakao rendah. Sedangkan, masalah rantai perdagangan yang panjang dan rendahnya posisi tawar petani bersumber pada kondisi organisasi petani yang lemah. Persoalan manajemen keuangan rumah tangga dipengaruhi oleh kurangnya pendampingan dan lembaga keuangan yang belum berperan maksimal. Keterbatasan pendampingan juga berakibat pada rendahnya kualitas SDM dan kelompok petani. Selain itu, ketiadaan kebijakan tata niaga juga membuat daya tawar kelompok petani juga rendah. Masalah-masalah di atas berakar pada keterbatasan anggaran dan program serta lemahnya koordinasi di antara *stakeholders* kakao. Permasalahan ini dapat divisualisasi dalam gambar pohon masalah disamping:

Gambar 1. Keterbatasan Anggaran dan Program Pemda Serta Lemahnya Koordinasi di Antara Stakeholders Kakao



III. Identifikasi Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, tujuan umum yang hendak dicapai adalah “Pendapatan petani kakao meningkat”. Untuk meraih tujuan ini, maka tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. **Kapasitas program dan anggaran di bidang pengembangan kakao meningkat.**
Keterbatasan program dan anggaran menjadi salah satu akar persoalan pengembangan kakao di Kabupaten Ende. Kondisi inilah yang melatari terjadi masalah-masalah yang dihadapi para petani kakao seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan modal, lemahnya manajemen keuangan rumah tangga, dan daya tawar petani yang rendah dalam rantai pemasaran. Deretan persoalan ini bermuara pada rendahnya pendapatan petani kakao. Karena itu, tujuan khusus dari kertas kebijakan ini adalah kapasitas dan anggaran meningkat. Artinya, ada peningkatan volume dan kualitas program dan anggaran yang mendukung serta fokus pada pengembangan kakao.
2. **Koordinasi antar *stakeholders* kakao meningkat.**
Beragam masalah dalam pengembangan kakao di Ende juga bersumber pada lemahnya koordinasi antar *stakeholders* kakao, terutama SKDP terkait dan lembaga keuangan. Masalah-masalah pengembangan kakao semisal keterbatasan dan SDM sesungguhnya bisa diatasi apabila ada konektivitas dan koordinasi lintas *stakeholders*. Karena itu, kertas kebijakan ini berikhtiar untuk mengkondisikan terciptanya koordinasi antar *stakeholders* kakao di Ende

IV. Alternatif Tindakan

Setelah masalah dan tujuan dirumuskan

secara jelas, langkah selanjutnya adalah memilih tindakan-tindakan yang dinilai efektif memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil konsultasi *stakeholders*, Tim RIA Kabupaten Ende menyusun alternatif tindakan sebagai berikut:

IV.1. Opsi 1: Do Nothing

Alternatif tindakan pertama adalah “Do Nothing” atau tidak melakukan apa-apa. Opsi ini dipilih ketika kondisi yang ada saat ini dibiarkan berjalan apa adanya. Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi apa pun selain yang sudah dijalankan selama ini. Dengan demikian, jika Pemda Ende memilih opsi “Do Nothing” dalam kebijakan pengembangan kakao maka pendapatan petani kakao tidak mengalami peningkatan. Alternatif ini dijadikan *baseline* untuk dibandingkan dengan opsi tindakan yang lain.

IV.2. Opsi 2: Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani

Alternatif tindakan kedua yang dipilih adalah Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani. Pemilihan opsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kapasitas petani berkorelasi dengan tingkat pendapatannya di kemudian hari. Semakin tinggi kapasitas petani maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Makna kapasitas di sini tidak hanya berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga tingkat kemampuan manajemen keuangan rumah tangga dan kebiasaan para petani kakao. Selain kapasitas petani, kelembagaan petani juga memiliki peran signifikan dalam pengembangan kakao di Kabupaten Ende. Kelembagaan petani di sini tidak hanya berkaitan dengan organisasi yang dibentuk oleh petani sendiri, tetapi juga lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan petani seperti BUMDes, UBSPS, dan Koperasi.

Adapun kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani kakao adalah:

1. Sosialisasi tahapan teknis mengenai syarat kadar air 7% kepada petani.

Tingkat pendapatan petani kakao yang rendah dipengaruhi oleh kualitas biji kakao yang rendah. Dalam keterdesakan finansial, para petani menjual biji kakao yang berkadar air di bawah 7%. Para pedagang pun akan membeli biji kakao dengan kualitas asal seperti ini dengan harga yang rendah. Karena itu, sosialisasi tahapan teknis mengenai kadar air 7% merupakan kegiatan penting yang akan dilakukan. Kegiatan ini akan dimotori oleh BKP3.

2. Memberikan pemahaman kepada petani agar tidak melakukan sistem ijon.

Penjualan kakao dengan sistem ijon merupakan praktik yang biasa di kalangan petani kakao di Ende. Defisit keuangan membuat para petani untuk mengijon dulu di para pedagang sebelum memanen biji kakao. Akibatnya, para petani menjual biji kakao dengan kualitas asal untuk mengembalikan uang pedagang ataupun untuk memenuhi kebutuhan yang lain semisal biaya sekolah anak atau acara adat. Dengan demikian, sistem ijon sesungguhnya menutup pintu bagi para petani kakao untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Untuk itu, pihak BKP3 akan memberikan sosialisasi kepada para petani untuk tidak melakukan sistem ijon.

3. Peningkatan SDM petani

Petani kakao merupakan *stakeholders* utama dalam rantai nilai pengembangan kakao. Lebih dari itu, para petani sendiri adalah penentu utama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Maju-mundurnya pengembangan kakao dan naik-turunnya kesejahteraan petani kakao sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan petani kakao itu sendiri. Untuk itu, pelatihan budidaya dan pengolahan pasca-panen menjadi program yang akan dilakukan

secara reguler. Yang menjadi prioritas adalah pertama, pelatihan P3S, sambung samping dan sambung pucuk; dan kedua, pelatihan fermentasi dan pengolahan biji kakao menurut standar mutu yang baku. Pengolahan yang asal-asalan tentu menghasilkan biji kakao yang berkualitas rendah. Karena itu, BKP3 akan merancang program untuk melakukan pelatihan secara reguler tentang standard mutu biji kakao. Pelatihan yang reguler diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengolahan biji kakao.

4. Memperkuat lembaga keuangan desa seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes.

Ketidakstabilan keuangan rumah tangga merupakan salah satu persoalan klasik yang dialami para petani kakao. Kondisi ini sering berdampak pada kebiasaan petani untuk melakukan sistem ijon dalam penjualan biji kakao atau tidak maksimal dalam budidaya dan pengolahan biji kakao. Alhasil, petani mengalami kesulitan untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam situasi seperti ini, kehadiran lembaga keuangan desa sesungguhnya diharapkan menjadi solusi bagi para petani untuk mengatasi masalah finansial rumah tangga. Karena itu, penguatan lembaga keuangan desa mesti menjadi salah satu langkah utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani kakao.

Di bawah koordinasi BPMPD, aktivitas yang akan dijalankan dalam rangka penguatan lembaga keuangan desa ini adalah:

(a) Pembenahan administrasi lembaga keuangan; (b) Peningkatan SDM keuangan. (c) Pengelolaan dana bergulir oleh lembaga keuangan desa; (d) Pembagian peran lembaga keuangan desa dalam setiap tahapan budi daya kakao; (f) Revitalisasi, reorganisasi dan restrukturisasi lembaga keuangan desa; (g) Perbaikan sistem pengelolaan keuangan lembaga.

5. Intensifikasi dan pemberdayaan poktan dan gapoktan

Dalam rantai pemasaran kakao, petani

kakao bertindak sebagai *price taker*. Para petani menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar dunia dan para pedagang. Kondisi ini disebabkan oleh kapasitas poktan dan gapoktan yang masih lemah. Lembaga petani ini sebenarnya menjadi wadah petani untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Lebih dari itu, organisasi petani ini bisa menjadi lembaga yang memiliki daya tawar dalam rantai pemasaran kakao. Oleh karena itu, BKP3 akan menggalakkan program dan kegiatan untuk menguatkan kembali lembaga poktan/gapoktan. Penguatan tersebut dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk pelatihan managerial organisasi dan SDM anggota kelompok. Selain itu, langkah-langkah lain yang perlu diambil adalah (a) mereorganisasi lembaga petani; (b) mengatur mekanisme dan peran *stakeholder* dalam lembaga; dan (c) melakukan praktik pemangkasan, pemupukan, sanitasi, pengendalian hama penyakit dengan benar.

6. Memfasilitasi penyediaan sarana produksi dan prasarana pasca panen kakao
Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan produksi dan pasca-panen merupakan salah satu persoalan dalam kegiatan usaha petani. Alhasil, biji kakao yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang “asalan” (mutu rendah dan tidak sesuai dengan standar baku). Karena itu, Dishutbun akan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen kepada para petani kakao.

IV.3. Opsi 3: Perbaikan Kebijakan Pengembangan Kakao

Alternatif tindakan ketiga yang dipilih adalah Peningkatan Kebijakan Pengembangan Kakao. Opsi ini dipilih karena sebagai komoditas unggulan, pengembangan kakao semestinya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pada pilihan ini, kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak hanya berorientasi kepada peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani, tetapi meluas

ke sektor atau bidang penunjang lain. Kegiatan-kegiatan dalam opsi ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan opsi kedua. Namun, pilihan tindakan ketiga ini dilengkapi dengan tambahan kegiatan-kegiatan lain. Karena itu, enam kegiatan tetap dijalankan dalam opsi ini yaitu: (1) Sosialisasi tahapan teknis mengenai syarat kadar air 7% kepada petani; (2) Memberikan pemahaman kepada petani agar tidak melakukan sistem ijon; (3) Peningkatan SDM petani; (4) Memperkuat lembaga keuangan desa seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes; (5) Intensifikasi dan pemberdayaan poktan dan gapoktan; (6) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen kakao. Adapun kegiatan yang menjadi tambahan dalam opsi ini adalah sbb:

1. Mempermudah akses transportasi dan jalan bagi petani ke sentra-sentra produksi

Akses transportasi dan jalan yang buruk merupakan salah satu persoalan dalam rantai nilai pengembangan kakao di Ende. Petani kakao kesulitan menjual biji kakao ke kota Ende. Mereka pun menjual biji kakao ke pedagang tingkat pertama yang menerapkan sistem *door to door*. Hal ini tentu berkonsekuensi pada harga yang diterima oleh petani kakao. Karena itu, Bappeda akan merancang kebijakan untuk mempermudah akses transportasi dan memperbaiki konektivitas (infrastruktur jalan) ke sentra-sentra produksi kakao.

2. Temu usaha antara petani kakao dengan pelaku usaha

Temu usaha petani kakao dan para pelaku usaha (pedagang dan industri kakao) bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang standar mutu dan harga kakao. Selama ini, petani kakao hanya berinteraksi langsung dengan pedagang pada saat transaksi jual-beli. Pada saat transaksi, pembeli atau pedagang baru menentukan harga setelah melihat kualitas biji kakao. Melalui kegiatan temu usaha, para petani dan pelaku usaha diharapkan bisa memiliki pemahaman yang sama tentang

standard mutu dan harga kakao. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Disperindag.

3. Menginformasikan keadaan harga jual kakao secara periodik kepada petani.

Para petani kakao membutuhkan informasi yang akurat dan periodik tentang harga kakao yang ditentukan oleh pasar dunia. Informasi tersebut penting untuk menghindari potensi permainan harga oleh para pedagang atau pelaku usaha kakao. Disperindag akan merancang program pemberian informasi harga kakao secara teratur kepada petani, termasuk penyediaan informasi melalui media internet.

4. Menerbitkan kebijakan tentang penjualan kakao melalui mekanisme lelang lewat koperasi.

Koperasi didorong membeli biji kakao melalui mekanisme lelang. Mekanisme ini bisa memberi jaminan harga yang sesuai dengan harapan petani, dengan tetap memperhatikan standar mutu biji kakao. Untuk itu, Disperindag akan menerbitkan kebijakan daerah tentang penjualan kakao melalui sistem lelang melalui koperasi. Sehingga memberi peluang dalam pengelolaan kakao dari hulu ke hilir.

V. Analisis Biaya dan Manfaat

Tiga alternatif tindakan telah dipilih. Langkah selanjutnya adalah memilih tindakan yang akan dilakukan. Untuk itu, perlu sebuah analisis manfaat-biaya dari setiap alternatif tindakan. Analisis manfaat dilakukan untuk mengidentifikasi semua kebaikan atau keuntungan dari sebuah tindakan. Sebaliknya, analisis biaya bertujuan untuk mendeteksi biaya atau kerugian dari penerapan tindakan tersebut. Analisis manfaat biaya ini akan dilakukan pada ketiga alternatif tindakan yang telah disusun bersama Tim RIA.

V.1. Opsi 1: Do Nothing

Dua tabel berikut akan menggambarkan resiko dan indikator dan *baseline*. Tabel 1 akan menunjukkan resiko-resiko apabila opsi *Do Nothing* yang akan dipilih. Sedangkan tabel 2 menjelaskan indikator dan *baseline* dalam upaya pengembangan kakao. Indikator dan *baseline* ini merupakan kondisi yang ada selama ini. Kondisi ini akan dibandingkan dengan opsi kedua dan ketiga.

Tabel 1. Analisis Resiko Opsi I

No.	Jenis Resiko	Dampak yang Ditimbulkan	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Resiko
1.	Pendapatan petani kakao akan semakin menurun	Besar	Besar	Besar
2.	Petani kakao berpotensi mengalami kelaparan	Besar	Kecil	Sedang
3.	Angka putus sekolah semakin tinggi	Besar	Kecil	Sedang
4.	Semakin meningkatnya hama penyakit	Besar	Besar	Besar
5.	PAD semakin menurun	Kecil	Besar	Sedang
6.	Kebutuhan harian semakin tidak terpenuhi	Besar	Besar	Besar
7.	Tingkat kepercayaan petani kakao ke pemerintah semakin berkurang	Besar	Besar	Besar
8.	Petani kakao semakin miskin	Besar	Kecil	Sedang

Tabel 2. Indikator dan Baseline Opsi I

No.	Indikator	Baseline	Keterangan
1.	Produksi kakao	4.469 ton	Dishutbun 2014
2.	Produktivitas kakao	969 kg/ha	Dishutbun 2014
3.	Luas tanam kakao	7.943,77	Dishutbun 2014
	a. TBM	3.267,08 ha	Dishutbun 2014
	b. TM	4.610,92 ha	Dishutbun 2014
	c. TT/TR	65.77 ha	Dishutbun 2014
4.	Jumlah KK yang menanam kakao	10.300 KK	Dishutbun 2014
5.	Harga biji kakao kering	Rp. 34.200/kg	7 April 2016
6.	Rata-rata harga di tahun 2014	Rp. 32.500/kg	Agustus 2015
7.	Jumlah penyuluh	172 orang	BKP3, april 2016
8.	Biaya produksi kakao per hektar	Rp.5.500.000	Dishutbun
9.	Jumlah gapoktan	151	Dishutbun
10.	Jumlah kelompok tani	677	Dishutbun
11.	Jumlah armada angkutan kakao	13	Disperindag
12.	Jumlah pedagang antar pulau tingkat kabupaten	3	Disperindag
13.	Jumlah BUMDes yang sudah terbentuk	40	BPMPD
14.	Luas kebun kakao yang terkena hama penyakit	Hama ringan=1,270,5 Ha, Hama berat= 554 Ha	Dishutbun

V.2. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani

Opsi tindakan kedua yang dipilih adalah Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani. Setiap intervensi tindakan pasti mendatangkan manfaat dan ada biaya yang dikeluarkan. Bagian ini akan menganalisis manfaat dan biaya yang dikeluarkan apabila opsi ini yang dipilih.

A. Analisis Manfaat

Bagian ini akan mengidentifikasi *stakeholder* yang menerima manfaat, jenis manfaat prediksi manfaat, dan tingkat manfaat yang akan diterima. Tabel 3

disamping akan menampilkan seberapa besar manfaat yang akan diterima dari pemilihan opsi ini.

B. Analisis Biaya

Setelah melakukan analisis manfaat, bagian ini akan menunjukkan biaya yang akan dikeluarkan apabila opsi dua yang dipilih. Bagian ini juga akan mengidentifikasi penerima atau penanggung biaya, jenis biaya, *baseline*, prediksi biaya, dan tingkat biaya yang akan dikeluarkan. Tabel 4, selanjutnya akan memvisualisasi biaya yang dikeluarkan pada opsi ini.

Tabel 3. Analisis Manfaat Opsi II

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi II	Tingkat Manfaat	Keterangan
1.	Pemerintah Daerah	<p>a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat</p> <p>b. Sumbangan kakao dalam PDRB meningkat</p> <p>c. Terbukanya lapangan kerja dalam usaha kakao</p> <p>d. Meningkatnya perhatian pihak luar (NGO, Akademi, Pemerintah pusat, Investor) terhadap komoditas kakao</p>	<p>Tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah</p> <p>Produktivitas kakao relatif sedang</p> <p>Daya serap lapangan kerja dalam usaha kakao rendah</p> <p>Program pemberdayaan usaha tani kerjasama antara NGO dan pemerintah sudah dilakukan (BPMPPD, DISHUTBUN dengan LSM tananua dan VECO) hanya pola kerja masih tumpang tindih dengan pemerintah. Belum ada koordinasi dengan pemerintah pusat, dan investor belum ada yang berniat membuka lahan usaha produksi kakao di tempat.</p>	<p>Tingkat partisipasi masyarakat meningkat</p> <p>Kontribusi kakao dalam PDRB meningkat</p> <p>Daya serap lapangan kerja dalam usaha kakao tinggi</p> <p>Program pemberdayaan usaha tani kakao, perkembangan pengetahuan hasil penelitian kakao semakin banyak, peningkatan jumlah investor untuk memproduksi produk bahan baku kakao</p>	<p>Besar</p> <p>Besar</p> <p>Besar</p> <p>Besar</p>	
		e. Aktivitas perekonomian semakin tumbuh	Kakao kurang memiliki dampak langsung pada perubahan perekonomian warga (jual harga rendah dan gelondongan, posisi tawar petani rendah)	Aktivitas perekonomian semakin meningkat karena kontribusi efektifitas dampak per kakao an pada pendapatan petani Ende.	Besar	

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi II	Tingkat Manfaat	Keterangan
1.	Pemerintah Daerah	f. Meningkatkan kontribusi kakao Ende terhadap kakao nasional	Kakao kab ende sudah cukup berkontribusi pada pemenuhan permintaan pasar nasional.	Kakao Kab. Ende memiliki kontribusi yang besar terhadap kakao nasional	sedang	BPS
2.	Petani kakao	a. Pendapatan meningkat b. Pengetahuan dan keterampilan meningkat	Pendapatan sejak tahun 2015-2016 terjadi sedikit penurunan karena perubahan iklim/cuaca, mengakibatkan panenpan menurun Petani menganggap kakao sekedar tanaman bantuan pemerintah	Pendapatan petani meningkat Adanya perubahan perilaku petani. Petani lebih serius mengelola kebun kakao dan partisipasi petani meningkat dalam mengikuti pelatihan	Besar Besar	
		c. Kemudahan akses permodalan	Petani sudah mengakses permodalan yang disediakan oleh lembaga keuangan	Peningkatan jumlah petani kakao yang dapat mengakses permodalan	Sedang	
		d. Posisi tawar meningkat	Petani sudah disiapkan dalam penguatan kapasitas ketrampilan sejak 2008	Posisi tawar kakao di level petani meningkat	Besar	
		e. Kemudahan akses sarana, prasarana dan informasi	Petani di desa Wolosoko terhubung dengan PT. Mayora di Maumere, setiap hari pada pukul 10 pagi ada informasi harga kakao dari perusahaan	Tersedia pusat informasi harga kakao terbaru setiap hari dan dapat diakses oleh setiap petani dengan mudah	Sedang	
		f. Sebagian petani dapat menjadi petani fasilitator	Fasilitator desa yang diberdayakan oleh lembaga non pemerintah hanya sedikit jumlahnya	Peningkatan jumlah petani yang menjadi fasilitator semakin meningkat, setiap Desa memiliki 1 fasilitator di setiap jenis komoditi.	Besar	

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi II	Tingkat Manfaat	Keterangan
3.	Pedagang	<p>a. Kuantitas dan kualitas biji kakao yang dibeli dari petani meningkat</p> <p>b. Pendapatan meningkat</p> <p>c. Intensitas perdagangan antar pulau meningkat</p>	<p>(binaan <i>Swisscontact</i> di desa wolosoko 4 orang dan di kel. nangapanda 4 orang)</p> <p>Kualitas biji kakao petani sedang</p> <p>Pendapatan relatif rendah karena volume produksi kakao dari petani mengalami sedikit penurunan</p> <p>Kakao diperdagangkan secara gelondongan pada pasar antar pulau</p>	<p>Peningkatan kuantitas dan kualitas biji kakao semakin bagus</p> <p>Pendapatan petani meningkat</p> <p>Peningkatan jumlah biji kakao yang diperdagangkan antar pulau</p>	Besar	Besar
4.	Lembaga keuangan Perbankan	<p>a. Potensi jumlah nasabah bertambah</p> <p>b. Alokasi jumlah dana KUR meningkat</p> <p>c. Kredit macet dari petani berkurang</p>	<p>Sudah terdapat 8 debitur dari petani kakao</p> <p>Dana KUR dari sejak maret 2015 sd desember 2015 terjadi penurunan. besar ostanding KUR per maret 2015 Rp.9.853.544.310. sedangkan ostanding KUR per des 2015 sebesar Rp.7.292.433.071,00</p> <p>Tingkat pengembalian dana pinjaman KUR dari petani relative tinggi</p>	<p>Peningkatan jumlah nasabah.</p> <p>Peningkatan alokasi dana KUR untuk petani kakao</p>	Sedang	Besar

Tabel 4. Analisis Biaya Opsi II

No.	Penerima Beban/Biaya	Jenis Beban/Biaya	Baseline	Prediksi Beban/Biaya Opsi II	Tingkat Beban/Biaya
1.	Pemerintah Daerah	a. Pelatihan P3S (pelatihan teknis dan penyediaan alat)	Rp. 50.000.000/desa	Rp. 50.000.000/desa	0
		b. Penguatan lembaga keuangan desa (pelatihan manajemen koperasi dan kewirausahaan dan UMKM)	Rp. 50.000.000/paket	Rp.10.000.000/kelurahan per tahun	0
		c. Pelatihan fermentasi (termasuk mengukur kadar air)	Rp. 0	Rp. 30.000.000/paket	Rp. 30.000.000
		d. Tester untuk mengukur kadar air	Rp. 0	Rp. 15.000.000/tahun	Rp. 15.000.000/tahun
		e. Timbangan	Rp. 0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
		f. Sarana dan prasarana pascapanen (kotak fermentasi, warikoko, timbangan duduk, tester kadar air, terpal)	Rp. 0	Rp. 140.000.000/paket	Rp. 140.000.000
		g. Pelatihan penguatan poktan dan gapoktan	Rp. 0	Rp. 30.000.000/paket	Rp. 30.000.000
		h. Biaya intensifikasi	Rp. 3.000.000/ha	Rp. 5.000.000/ha	Rp. 2.000.000/ha

V. 3. Opsi 3: Peningkatan Kebijakan Pengembangan Kakao

Alternatif tindakan yang ketiga adalah Peningkatan Kebijakan Pengembangan Kakao. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam opsi ini bisa mendatangkan manfaat sekaligus ada biaya yang akan dikeluarkan.

A. Analisis Manfaat

Bagian ini akan menguraikan *stakeholders* penerima manfaat, jenis manfaat,

baseline, prediksi dan tingkat manfaat yang diterima. Tabel 5 selanjutnya akan memvisualisasikan manfaat dari opsi ketiga.

B. Analisis Biaya

Bagian ini akan menggambarkan *stakeholders* yang menanggung beban atau biaya, jenis biaya, *baseline*, prediksi dan tingkat biaya yang dikeluarkan. Tabel 6 berikutnya akan memvisualisasikan biaya yang dikeluarkan pada opsi ketiga ini.

Tabel 5. Analisis Manfaat Opsi III

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi III	Tingkat Manfaat	Keterangan
1.	Pemerintah Daerah	a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat	Tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah	Tingkat partisipasi masyarakat meningkat	Besar	
		b. Sumbangan kakao dalam PDRB meningkat	Produktivitas kakao relatif sedang	Kontribusi kakao dalam PDRB meningkat	Besar	
		c. Terbukanya lapangan kerja dalam usaha kakao	Daya serap lapangan kerja dalam usaha kakao relatif rendah	Daya serap lapangan kerja dalam usaha kakao tinggi	Besar	
		d. Meningkatnya perhatian pihak luar (NGO, akademisi, Pemerintah pusat, investor) terhadap komoditas kakao	Program pemberdayaan usaha tani kerjasama antara NGO dan pemerintah sudah dilakukan (BMPD, DISHUTBUN dengan LSM tananua dan VECO) hanya pola kerja masih tumpang tindih dengan pemerintah. Belum ada koordinasi dengan pemerintah pusat, dan investor belum ada yang berniat membuka lahan usaha produksi kakao di tempat	Program pemberdayaan usaha tani kakao, perkembangan pengetahuan hasil penelitian kakao semakin banyak, peningkatan jumlah investor untuk memproduksi produk berbahan baku kakao	Besar	
		e. Aktivitas perekonomian semakin tumbuh	Kakao kurang memiliki dampak langsung pada perubahan perekonomian warga (jual harga rendah dan gelondongan, posisi tawar petani rendah)	Aktivitas perekonomian semakin menggeliat karena kontribusi efektivitas dampak per kakao an pada pendapatan petani Ende.	Besar	
		f. Meningkatnya kontribusi kakao Ende terhadap kakao nasional	Kakao ende sudah cukup berkontribusi pada pemenuhan permintaan pasar nasional	Kakao Kab. Ende memiliki kontribusi yang besar terhadap kakao nasional	Besar	BPS
2.	Petani Kakao	Pendapatan meningkat	Pendapatan sejak tahun 2015 sd 2016 terjadi sedikit penurunan karena perubahan iklim dan cuaca, mengakibatkan panen menurun	Pendapatan petani meningkat	Besar	

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi III	Tingkat Manfaat	Keterangan
2.	Petani Kakao	b. Pengetahuan dan keterampilan meningkat	Petani menganggap kakao sekedar tanaman bantuan pemerintah	Adanya perubahan perilaku petani. Petani lebih serius dalam mengelola kebun kakao dan partisipasi petani kakao meningkat dalam mengikuti pelatihan	Besar	
		c. Kemudahan akses permodalan	Petani sudah mengakses permodalan yang disediakan oleh lembaga keuangan	Peningkatan jumlah petani kakao yang dapat mengakses permodalan	Sedang	
		d. Posisi tawar meningkat	Petani sudah disiapkan dalam penguatan kapasitas ketrampilan sejak tahun 2008	Posisi tawar kakao di level petani meningkat	Besar	
		e. Kemudahan akses sarana, prasarana dan informasi	Petani di desa Wolosoko terhubung dengan PT. Mayora di Maumere, setiap hari pada pukul 10 pagi ada informasi harga kakao dari perusahaan	Tersedia pusat informasi harga kakao terbaru setiap hari dan dapat diakses oleh setiap petani dengan mudah	Sedang	
		f. Sebagian petani dapat menjadi petani fasilitator	Fasilitator desa yang diberdayakan oleh lembaga non pemerintah hanya sedikit jumlahnya (binaan Swisso-tact di desa wolosoko 4 orang dan di kel nangapanda 4 orang)	Peningkatan jumlah petani yang menjadi fasilitator semakin meningkat, setiap Desa memiliki 1 fasilitator di setiap jenis komoditi.	Besar	
		a. Kuantitas dan kualitas biji kakao yang dibeli dari petani meningkat	Kualitas biji kakao petani sedang	Peningkatan kuantitas dan kualitas biji kakao semakin bagus	Besar	
3.	Pedagang	b. Pendapatan meningkat	Pendapatan relatif rendah karena volume produksi kakao dari petani mengalami sedikit penurunan	Pendapatan petani meningkat	Besar	
		c. Intensitas perdagangan antar pulau meningkat	Kakao diperdagangkan secara gelondongan pada pasar antar pulau	Peningkatan jumlah biji kakao yang diperdagangkan antar pulau	Sedang	

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Baseline	Prediksi Manfaat Opsi III	Tingkat Manfaat	Keterangan
4.	Lembaga keuangan Perbankan	<p>a. Potensi jumlah nasabah bertambah</p> <p>b. Alokasi jumlah dana KUR meningkat</p> <p>c. Kredit macet dari petani berkurang</p>	<p>Sudah terdapat 8 debitur dari petani kakao</p> <p>Dana KUR dari sejak maret 2015 sd desember 2015 terjadi penurunan. besar outstanding KUR per maret 2015 Rp.9.853.544.310, sedangkan outstanding KUR per des 2015 sebesar Rp.7.292.433.071,00</p> <p>Tingkat pengembalian dana pinjaman KUR dari petani relative tinggi</p>	<p>Peningkatan jumlah nasabah.</p> <p>Peningkatan alokasi dana KUR untuk petani kakao</p> <p>Tidak ada kredit macet dari petani kakao</p>	Sedang	Besar

Tabel 6. Analisis Biaya Opsi III

No.	Penerima Beban/Biaya	Jenis Beban/Biaya	Baseline	Prediksi Beban/Biaya Opsi III	Tingkat Beban/Biaya	Keterangan
1.	Pemerintah Daerah	a. Pelatihan P3S (pelatihan teknis dan penyediaan alat)	Rp. 50.000.000/desa	Rp. 50.000.000/desa	Rp. 0	
		b. Penguatan lembaga keuangan desa (pelatihan manajemen koperasi dan kewirausahaan dan UMKM)	Rp. 10.000.000/paket	Rp. 10.000.000/kelurahan per tahun	Rp. 0	
		c. Pelatihan fermentasi (termasuk mengukur kadar air)	Rp. 0	Rp. 30.000.000/paket	Rp. 30.000.000	
		d. Tester untuk mengukur kadar air	Rp. 0	Rp. 15.000.000/Tahun	Rp. 15.000.000/Tahun	
		e. Timbangan	Rp. 0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
		f. Temu usaha	Rp. 15.000.000/paket	Rp. 25.000.000/paket	Rp. 10.000.000	
		g. Akses jalan ke sentra produksi	Rp. 0	Rp. 120.000.000/KM	Rp. 120.000.000/KM	
		h. Sarana dan prasarana pascapanen (kotak fermentasi, warikoko, timbangan duduk, tester kadar air, terpal)	Rp. 0	Rp. 140.000.000/paket	Rp. 140.000.000	
		i. Pelatihan penguatan poktan dan gapoktan	Rp. 0	Rp. 30.000.000/paket	Rp. 30.000.000	
		j. Biaya intensifikasi	Rp. 3.000.000/ha	Rp. 5.000.000/ha	Rp. 2.000.000/ha	
		k. Sistem informasi harga kakao	Rp. 0	Rp. 50.000.000/thn	Rp. 50.000.000	

VI. Alternatif Terpilih

Analisis manfaat dan biaya menjadi instrumen bagi Tim RIA untuk mengidentifikasi program yang akan diterapkan dalam kebijakan pengembangan kakao di Ende. Alternatif tindakan yang dipilih adalah program yang mendatangkan manfaat yang besar dan menghabiskan biaya (kerugian) yang lebih kecil dibandingkan dengan opsi tindakan yang lain. Berdasarkan analisis manfaat dan biaya tersebut, alternatif yang dipilih Tim RIA Ende adalah **Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani Pendukung**.

Alternatif ini dipilih karena memiliki daya yang lebih besar untuk menghasilkan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan empat opsi tindakan yang lain. Perbandingan biaya manfaat dari kelima alternatif tindakan dapat dilihat pada tabel 7 di halaman selanjutnya.

Pemilihan alternatif ini tentu menimbulkan dampak negatif bagi *stakeholders* tertentu. *Stakeholders* yang berpotensi mendapat kerugian dari program ini adalah pedagang pengepul yang menjalankan sistem *door to door*. Sebaliknya, penerima manfaat dari program ini adalah seluruh *stakeholders* dalam rantai nilai kakao. Namun, program

ini menghasilkan eksternalitas positif, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah, peningkatan produktivitas kakao, peningkatan PDRB daerah, peningkatan pendapatan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

VII. Strategi Implementasi

Berdasarkan opsi yang terpilih oleh forum, yaitu **“Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani”**, kemudian dilakukan perumusan strategi implementasi agar setiap aktivitas dari opsi terpilih dapat diimplementasikan. Perumusan strategi implementasi juga bertujuan agar opsi dapat dijalankan secara menyeluruh. Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam opsi ini adalah:

1. Sosialisasi tahapan teknis mengenai syarat kadar air 7% kepada petani;
2. Memberikan pemahaman kepada petani agar tidak melakukan sistem ijon;
3. Peningkatan SDM petani;
4. Memperkuat lembaga keuangan desa seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes;
5. Intensifikasi dan pemberdayaan poktan dan gapoktan;
6. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen kakao.

Berikut ada 6 rincian strategi implementasi untuk setiap aktifitas:



Tabel 7. Perbandingan Manfaat Biaya

NO.	OPSI	BEBAN BIAYA	MANFAAT
1.	Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	Rp. 271.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat 2. Sumbangan kakao dalam PDRB meningkat 3. Terbukanya lapangan kerja dalam usaha kakao 4. Meningkatnya perhatian pihak luar (NGO, akademisi, Pemerintah Pusat, investor) terhadap komoditas kakao 5. Aktivitas perekonomian semakin tumbuh 6. Meningkatnya kontribusi kakao Ende terhadap kakao nasional 7. Pendapatan petani meningkat 8. Pengetahuan dan keterampilan meningkat 9. Kemudahan akses permodalan 10. Posisi tawar meningkat 11. Sebagian petani dapat menjadi petani fasilitator 12. Kuantitas dan kualitas biji kakao yang dibeli dari petani meningkat 13. Pendapatan meningkat 14. Intensitas perdagangan antar pulau meningkat 15. Potensi jumlah nasabah bertambah 16. Alokasi jumlah dana KUR meningkat 17. Kredit macet dari petani berkurang
2.	Peningkatan Kebijakan Pengembangan Kakao	Rp. 397.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat 2. Sumbangan kakao dalam PDRB meningkat 3. Terbukanya lapangan kerja dalam usaha kakao 4. Meningkatnya perhatian pihak luar (NGO, akademisi, Pemerintah Pusat, investor) terhadap komoditas kakao 5. Aktivitas perekonomian semakin tumbuh 6. Meningkatnya kontribusi kakao Ende terhadap kakao nasional 7. Pendapatan petani meningkat 8. Pengetahuan dan keterampilan meningkat 9. Kemudahan akses permodalan 10. Posisi tawar meningkat 11. Sebagian petani dapat menjadi petani fasilitator 12. Kuantitas dan kualitas biji kakao yang dibeli dari petani meningkat 13. Pendapatan meningkat 14. Intensitas perdagangan antar pulau meningkat 15. Potensi jumlah nasabah bertambah 16. Alokasi jumlah dana KUR meningkat 17. Kredit macet dari petani berkurang

1. Sosialisasi tahapan teknis mengenai syarat kadar air 7% kepada petani

Untuk aktivitas 1, lebih menasar pada kegiatan yang berjenis sosialisasi. Bentuk kegiatan pendukung lebih diarahkan pada pertemuan-pertemuan maupun penyebaran informasi terkait syarat kadar air 7% kepada petani. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Sosialisasi Tahapan Teknis Mengenai Syarat Kadar Air 7% kepada Petani

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pertemuan dengan Petani/Poktan untuk memberikan pengetahuan mengenai syarat kadar air 7%	Distanbun, BKP3, Penyuluh, Disperindag
2	Melakukan pengumuman melalui siaran RRI di Ende	Distanbun, BKP3, Disperindag
3	Mensosialisasikan syarat kadar air 7% di setiap ruang publik seperti pusat penyuluhan desa, posyandu, kantor kecamatan dan kantor bupati.	Distanbun, BKP3, Disperindag
4	Memasang Billboard atau Spanduk di kecamatan	Kecamatan, Distanbun, BP3, Disperindag
5	Memfaatkan Musyawarah Desa untuk mensosialisasikan syarat kadar air 7%	Pemerintah Desa
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	1. Sosialisasi 2. Rapat pertemuan	
Analisis Biaya	Biaya: (1) Bertemu dengan masyarakat untuk memberikan informasi sebesar Rp. 550.000/1 kali perjalanan; tahun; (3) menempelkan informasi (papan informasi) yang berisi program-program di ruang publik sebesar Rp. 250.000/papan; (4) papan informasi di pusat penyuluhan desa sebesar Rp.5.000.000/ desa. (5) Sosialisasi di RRI Ende sebesar Rp. 2.000.000,- per slot acara	
Kemungkinan Ketidakpatuhan	Tidak ada	
Sanksi	Tidak ada	
Insentif	Memprioritaskan petani yang memproses biji kakao sampai kadar air 7% untuk pemasaran langsung ke pabrikan	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

2. Memberikan pemahaman kepada petani agar tidak melakukan sistem ijon

Untuk aktivitas 2, lebih menasar pada kegiatan yang berjenis sosialisasi, kurang lebih sama dengan aktivitas no. 1. Bentuk kegiatan pendukung lebih diarahkan pada pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai keuntungan dari tidak melakukan sistem ijon. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Memberi Pemahaman kepada Petani agar Tidak Melakukan Sistem Ijon

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pertemuan berkala dengan Petani/Poktan untuk memberikan pemahaman mengenai kerugian sistem ijon	Distanbun, BKP3, Penyuluh, Disperindag
2	Melakukan pengumuman atau dialog interaktif secara berkala melalui siaran RRI di Kabupaten Ende	Distanbun, BKP3, Disperindag
3	Mensosialisasikan kepada petani di setiap ruang publik seperti pusat penyuluhan desa, posyandu, kantor kecamatan dan kantor bupati.	Distanbun, BKP3, Disperindag
4	Memasang Billboard atau Spanduk di kecamatan	Kecamatan, Distanbun, BKP3, Disperindag
5	Memanfaatkan Musyawarah Desa untuk mensosialisasikan kerugian sistem ijon	Pemerintah Desa
6.	Menampung hasil panen biji kakao petani melalui UPH	Disperindag, UPH
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	1. Sosialisasi 2. Rapat pertemuan	
Analisis Biaya	Biaya: (1) Bertemu dengan masyarakat untuk memberikan informasi sebesar Rp. 550.000/1 kali perjalanan; tahun; (3) menempelkan informasi (papan informasi) yang berisi program-program di ruang publik sebesar Rp. 250.000/papan; (4) papan informasi di pusat penyuluhan desa sebesar Rp.5.000.000/ desa. (5) Sosialisasi di RRI Ende sebesar Rp. 2.000.000,- per slot acara.	
Kemungkinan Ketidakpatuhan	1. Petani bermodal kecil 2. Pedagang pengepul tingkat desa	
Sanksi	Memberikan surat peringatan kepada pedagang yang tidak membeli biji berkualitas di petani, jika tidak dihiraukan sampai pada SP 3 maka izin berjualan akan dicabut	
Insentif	Bagi petani yang tidak melakukan sistem ijon akan diberikan kemudahan akses permodalan	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

3. Peningkatan SDM Petani

Untuk aktivitas ke tiga, lebih menasar pada kegiatan yang berjenis peningkatan kapasitas dan pengetahuan seperti pelatihan maupun praktek lapangan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Peningkatan SDM Petani

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelatihan berkelanjutan bagi para petani kakao (<i>On Farm & Off Farm</i>)	Distanbun, BKP3, Penyuluh,
2	Melakukan pertemuan berkala dengan Poktan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan kakao terkini di Kabupaten Ende	Distanbun, BKP3, Disperindag
3	Membuat demplot-demplot piloting kakao unggulan sebagai sarana belajar petani di setiap kecamatan	Distanbun, BKP3, Disperindag
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	1. Pelatihan (<i>On Farm & Off Farm</i>) 2. Praktek Lapangan	
Analisis Biaya	Biaya: (1) Biaya pelatihan sebesar Rp. 20 juta untuk setiap satu kali pelatihan intensif. (2) Biaya pembuatan demplot untuk satu titik perkecamatan sebesar Rp. 5.000.000,-.	
Kemungkinan Ketidakpatuhan	Tidak ada	
Sanksi	Tidak ada	
Insentif	Petani yang mengikuti pelatihan akan memperoleh kesempatan studi banding ke daerah penghasil kakao lainnya seperti Kabupaten Sikka.	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

4. Memperkuat lembaga keuangan desa seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes

Untuk aktivitas 4, lebih menasar pada kegiatan yang bersifat penguatan lembaga keuangan desa seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Memperkuat Lembaga Keuangan Desa Seperti UBSP, Koperasi, dan BUMDes

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pendirian BUMDes sebagai penyalur hasil biji kakao	Distanbun, BKP3, Penyuluh, BPMPD
2	Pelatihan penguatan kelembagaan seperti keorganisasian, rencana strategis, rencana kerja	BPMPD, Diskop UMKM, Bappeda
3	Pelatihan hubungan eksternal kelembagaan	Distanbun, BKP3, Disperindag
4	Pembuatan payung hukum legalitas bagi lembaga keuangan desa	Bagian Hukum
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	1. Pelatihan Kelembagaan 2. Pembuatan payung hukum kelembagaan	
Analisis Biaya	Biaya: (1) Biaya pelatihan sebesar Rp. 20 juta untuk setiap satu kali pelatihan intensif.	
Kemungkinan Ketidapatuhan	Tidak ada	
Sanksi	Tidak ada	
Insentif	1. Pemberian dukungan kepada lembaga yang mengikuti program penguatan baik dari segi payung hukum maupun kelembagaan. 2. Perluasan akses kepada lembaga keuangan perbankan	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

5. Intensifikasi dan pemberdayaan poktan dan gapoktan

Untuk aktivitas 5, lebih menysasar pada kegiatan yang bersifat penguatan dan pemberdayaan poktan dan gapoktan, seperti dalam hal manajemen keorganisasian. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Intensifikasi dan Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelatihan keorganisasian poktan dan gapoktan	Dishutbun, Bappeda, BKP3
2	Pertemuan poktan dan gapoktan secara berkala	BKP3
3	Penguatan legalitas poktan melalui SK Poktan	Bag. Hukum
4	Memberdayakan poktan sebagai sarana penjualan dan pusat informasi	Disperindag
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	1. Pelatihan keorganisasian 2. Pembuatan SK Poktan	
Analisis Biaya	Biaya: (1) Biaya pelatihan sebesar Rp. 20 juta untuk setiap satu kali pelatihan intensif. (2) rapat koordinasi antara Pemda, Pelaku Usaha dan Poktan yang rutin persemester atau per triwulan tergantung kebutuhan sebesar Rp. 20.000.000/ tahun.	
Kemungkinan Ketidapatuhan	Tidak ada	
Sanksi	Tidak ada	
Insentif	Perluasan akses poktan kepada pasar, penyedia saprodi maupun lembaga keuangan	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

6. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen kakao

Untuk aktivitas 6, agar petani dapat lebih menysasar pada kegiatan yang memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen kakao, sehingga nantinya petani dapat memiliki kemampuan melakukan olahan lebih lanjut atas hasil panen biji kakao. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktifitas ini bisa dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Kakao

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan sarana prosesing di poktan	Dishutbun
2	Penguatan sarana prosesing biji kakao di UPH	Dishutbun
STRATEGI IMPLEMENTASI		
Mekanisme Pelaksanaan	Pemberian bantuan sarpras pada poktan dan UPH	
Analisis Biaya	Biaya pengadaan peralatan pengolahan biji kakao sebesar Rp. 20.000.000/Poktan dan UPH.	
Kemungkinan Ketidakpatuhan	Tidak ada	
Sanksi	Tidak ada	
Insentif	Peralatan prosesing biji kakao	
Efektifitas Sosialisasi	Efektif	
Monitoring	Setiap 6 bulan	

VIII. Konsultasi Stakeholders

Konsultasi publik merupakan aktivitas yang mesti dilakukan dalam setiap tahapan RIA. Sebab kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders*, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Dalam kebijakan peningkatan pendapatan petani kakao di Ende, pihak yang dikonsultasi antara lain petani, poktan, pemda, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dsb. (lihat tabel). Adapun mekanisme konsultasinya antara lain melalui rapat koordinasi, temu usaha, dan rembuk tani. Tabel 14 berikut akan menggambarkan rencana konsultasi publik dalam seluruh tahapan pembuatan kebijakan. Tentu metode ini bersifat fleksibel dan adaptif dengan setiap perkembangan yang akan terjadi. ■

Tabel 14. Konsultasi Stakeholders

KONSULTASI STAKEHOLDERS	
Pihak yang akan dikonsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. petani b. PPL c. tokoh adat d. toko masyarakat e. pemerintah desa f. perbankan g. PKL h. Pengepul i. Koperasi j. Pedagang k. Akademisi l. Dishutbut m. Disperindag n. BKP3 o. BPMPD p. BKPMMD q. Bappeda r. DPRD komisi 2 s. LSM t. Media massa dan elektronik u. BPS
Mekanisme konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Koordinasi b. Temu Usaha c. Rembuk Tani
Identifikasi informasi yang diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Baseline</i> (data pendukung) b. Kondisi teknis sosial dan ekonomi saat ini c. Validasi data produktivitas petani kakao d. Validasi pendapat petani kakao e. Konfirmasi kontribusi kakao terhadap perkebunan f. Validasi luas areal kakao g. Validasi data volume perdagangan kakao antar pulau h. Regulasi terkait kakao saat ini i. Potensi lahan yang bisa dikembangkan j. Pemahaman mengenai prosedur kredit dan program-program kredit untuk petani k. Tingkat pemahaman awal petani dalam pengembangan kakao l. Informasi kerjasama antara Lembaga penelitian kampus dan pemerintah





Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org, Facebook: kppod